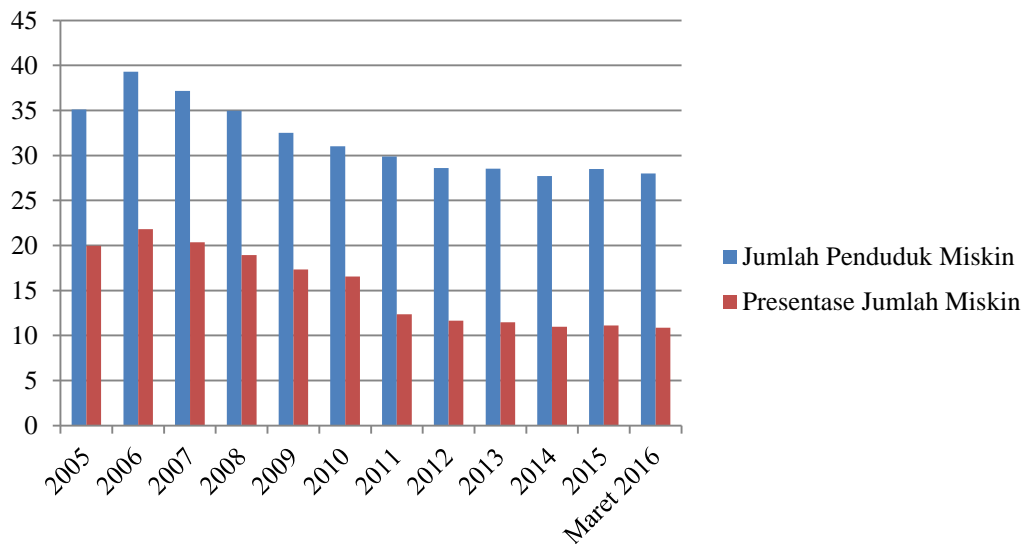


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan bukan merupakan sesuatu hal yang baru melainkan fenomena ini telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya. Masalah kemiskinan sendiri menjadi salah satu tugas utama untuk pemerintah. Beberapa program penanggulangan kemiskinan di Indonesia tercipta demi mengurangi jumlah tingkat kemiskinan. Namun, penanggulangan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Akibat dari program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat mengakibatkan perekonomian penduduk miskin dengan mudah akan kembali kepada garis kemiskinan. Berikut akan di sajikan grafik jumlah kemiskinan di Indonesia dari tahun 2005-2016.



Gambar 1.1
Grafik Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat penurunan angka kemiskinan di Indonesia periode September 2015 yaitu dalam angka 28,51 atau sekitar 11,13% menjadi 28,01 pada bulan Maret 2016 atau sekitar 10,86% ini disebabkan inflasi yang rendah dan

terkendali sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah orang miskin di Indonesia (Antara, 2016). Menurut Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers tentang profil kemiskinan Indonesia Maret 2016 di Jakarta faktor lain yang memengaruhi penduduk miskin adalah rata-rata harga kebutuhan pokok yang turun selama periode September 2015 sampai Maret 2016 seperti misalnya harga daging ayam ras sebesar 4,08% (Rp 37.742 menjadi Rp 36.203). Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun di mana pada Agustus 2015 sebesar 6,18% menjadi 5,5% pada bulan Februari 2016.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret 2015 sebanyak 4.435.699 orang atau sekitar 9,53%. Angka tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 196.739 orang (0,36%) dibandingkan kondisi pada bulan September 2014 sebanyak 4.238.960 orang (9,18%). Adapun presentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada bulan Maret 2015 sebesar 59,48%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan September 2014 (60,25%). Sementara itu, persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan Maret 2015 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 40,52%. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan September 2014 (39,75%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016). Kenaikan presentase tingkat kemiskinan di Jawa Barat tersebut dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan beberapa kota atau kabupaten yang bersangkutan, salah satunya Kabupaten Garut.

Kemiskinan di Kabupaten Garut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor alam ataupun faktor ekonomi. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, namun jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan masih terbilang relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Garut Tahun
2006-2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2006	2.274.974	434.5	151.382	19.61
2007	2.309.773	386.1	151.974	17.43
2008	2.456.888	434.5	122.972	19.61
2009	2.683.735	410.6	154.245	17.87
2010	2.737.526	335.6	180.406	13.94
2011	2.789.267	330.9	202.350	13.50
2012	2.830.730	315.8	213.707	12.72
2013	3.003.044	320.9	226.308	12.79
2014	3.156.829	315.6	234.661	12.47

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2014)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi dari tahun 2006 – 2014. Sedangkan garis kemiskinan di Kabupaten Garut pada periode tersebut mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten Garut sebesar Rp. 234.661,00/ bulan. Angka tersebut merupakan angka terbesar dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa upaya untuk menanggulangi kemiskinan masih belum optimal.

Tingginya persentase penduduk miskin di suatu wilayah akan berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini karena umumnya pendapatan penduduk miskin tersebut sangat rendah sehingga dari segi pendapatan perkapita juga rendah, apalagi rata-rata jumlah anggota rumah tangga penduduk miskin umumnya lebih banyak dari rumah tangga penduduk tidak miskin sehingga rata-rata pendapatan perkapita penduduk tersebut relatif lebih rendah (Harlik, 2013, hlm. 110). Berdasarkan data dari BPS salah satu cara untuk mengukur keluarga miskin adalah dengan melalui pengukuran keluarga sejahtera. Pengelompokan

keluarga sejahtera yaitu kategori pra KS, KS1, KS2, KS3 dan KS3+. Adapun pengelompokkan keluarga sejahtera di Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Garut Tahun 2014

No	Kecamatan	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Jumlah
1	Garut Kota	7,902	9,442	8,838	8,707	73	34,962
2	Karangpawitan	5,680	10,270	9,108	7,906	74	33,038
3	Wanaraja	2,847	3,874	3,978	2,834	143	13,676
4	Tarogong Kaler	5,051	7,749	5,952	6,322	173	25,247
5	Tarogong Kidul	3,065	10,926	8,833	4,103	911	27,838
6	Banyuresmi	6,398	9,940	6,037	1,560	176	24,111
7	Samarang	4,401	9,352	4,545	2,194	29	20,521
8	Pasirwangi	6,060	8,269	2,551	869	99	17,848
9	Leles	5,479	6,238	5,496	3,955	574	21,742
10	Kadungora	4,325	8,041	8,917	3,548	465	25,296
11	Leuwigoong	4,576	5,766	1,922	326	5	12,595
12	Cibatu	3,814	8,492	5,024	2,362	162	19,854
13	Kersamanah	2,655	3,695	2,375	1,339	126	10,190
14	Malangbong	6,123	13,331	9,329	4,154	371	33,308
15	Sukawening	2,322	5,143	6,339	1,536	73	15,413
16	Karang Tengah	289	2,552	1,452	337	21	4,651
17	Bayongbong	8,800	8,879	5,499	4,812	98	28,088
18	Cigedug	2,589	4,658	3,404	457	1	11,109
19	Cilawu	7,069	8,044	9,247	6,475	508	31,343
20	Cisurupan	8,689	9,605	8,055	2,386	120	28,855
21	Sukaresmi	3,198	4,109	3,187	389	43	10,926
22	Cikajang	7,987	9,049	5,062	1,671	145	23,914
23	Banjarwangi	6,959	6,715	2,568	579	67	16,888
24	Singajaya	3,526	4,224	4,815	2,104	0	14,669
25	Cihurip	1,661	2,501	1,078	536	0	5,776
26	Peundeuy	3,059	2,602	424	68	19	6,172
27	Pameungpeuk	1,566	5,017	4,242	1,500	8	12,333
28	Cisompet	4,556	5,675	4,409	1,042	122	15,804

29	Cibalong	2,856	6,636	3,860	998	43	14,393
30	Cikelet	1,310	6,485	4,165	835	133	12,928
31	Bungbulang	3,889	6,604	5,483	1,974	165	18,115
32	Mekarmukti	1,181	1,730	2,026	322	0	5,259
33	Pakenjeng	7,415	6,595	4,768	1,737	0	20,515
34	Pamulihan	1,592	2,398	1,511	247	14	5,762
35	Cisewu	3,403	3,661	3,010	1,127	55	11,256
36	Caringin	2,445	2,041	2,934	1,020	462	8,902
37	Talegong	3,223	3,534	1,968	1,221	74	10,020
38	Limbangan	6,576	8,774	5,065	1,911	180	22,506
39	Selaawi	5,269	3,339	1,433	901	241	11,183
40	Cibiuk	2,538	2,556	3,196	388	61	8,739
41	Pangatikan	2,890	2,321	4,307	1,394	382	11,294
42	Sucinaraja	2,111	1,762	1,364	3,406	4	8,647

Sumber: (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut, 2014)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Garut memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi terutama di Kecamatan Bayongbong. Menurut sekretaris Kecamatan Bayongbong yang penulis temui di lapangan, penyebab dari kemiskinan di Kecamatan Bayongbong adalah kurang terbukanya lapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat berkerja sebagai buruh ataupun bekerja serabutan. Selain itu, minimnya keterampilan yang mereka miliki menjadi penyebab lain dari kemiskinan di Kecamatan Bayongbong sehingga sebagian besar dari kepala keluarga miskin tidak memiliki pekerjaan tetap. Padahal kecamatan ini berlokasi yang dekat dengan Kabupaten Garut yang seharusnya memiliki informasi lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga akhirnya akan berdampak kepada potensi jiwa keluarga miskin yang sedikit. Selain itu akses transportasi, sarana dan pra sarana di Kecamatan ini cukup memadai. Akan tetapi, jumlah keluarga miskin di Kecamatan ini masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada data pra penelitian jumlah penduduk menurut pentahapan keluarga sejahtera di Kecamatan Bayongbong tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Bayongbong Tahun 2014

No	Desa	Pra KS	KS 1	KS 2	KS 3	KS 3+
1.	Salakuray	536	452	208	177	0
2.	Sirnagalih	578	399	530	263	0
3.	Hegarmanah	351	241	498	210	8
4.	Sukarame	197	150	266	484	0
5.	Sukamanah	473	137	257	588	0
6.	Panembongan	734	304	422	109	6
7.	Karyajaya	342	366	281	125	1
8.	Ciela	35	816	330	55	3
9.	Cinisti	489	275	348	133	0
10.	Bayongbong	413	372	480	436	2
11.	Ciburuy	637	436	172	72	5
12.	Pamalayan	733	190	100	430	0
13.	Mulyasari	595	282	402	536	0
14.	Mekarsari	556	167	177	254	11
15.	Cikedokan	650	985	110	0	0
16.	Sukasenang	368	353	209	283	2
17.	Mekarjaya	688	279	317	105	7
18.	Banjarsari	425	145	372	550	53
Jumlah		8800	6349	5499	48112	89

Sumber : (Data Kecamatan Bayongbong, 2014)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas jumlah penduduk menurut pentahapan keluarga sejahtera di Kecamatan Bayongbong pada Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa Desa Panembongan merupakan desa yang memiliki jumlah Pra Keluarga Sejahtera tertinggi yaitu sebanyak 734 Kepala Keluarga pra sejahtera (Pra KS). Angka ini tidak jauh berbeda dengan Desa Pamalayan yang berjumlah 733 Kepala Keluarga Pra KS. Sedangkan jumlah Pra Keluarga Sejahtera terendah yaitu sebanyak 35 Kepala Keluarga Pra KS di Desa Ciela.

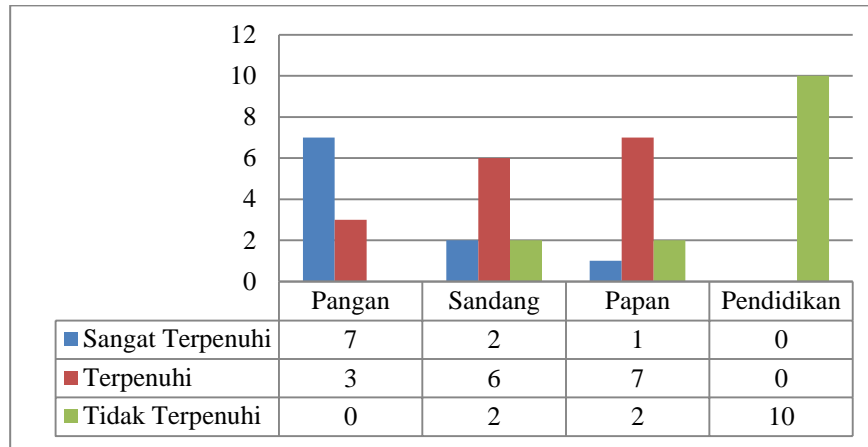
Kemiskinan sebagai ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk memperoleh fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal

ini termasuk tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memperoleh kecukupan makanan, pakaian atau tempat berlindung (kemiskinan karena pendapatan) atau tidak mampu mengobati penyakit ke sarana kesehatan (kemiskinan karena kesehatan yang buruk) juga tidak memiliki akses terhadap pendidikan, partisipasi politik, atau peran di dalam bermasyarakat (Limbong, 2011, hlm. 206). Selain itu penduduk miskin biasanya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan penduduk lainnya yang tidak miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo, 2006, hlm. 130) dalam jurnalnya yang berjudul *Studi Tentang Bentuk Kemiskinan Penduduk di Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso* bahwa untuk menganalisis tentang permasalahan kemiskinan, terlebih dahulu dapat digambarkan tentang kondisi karakteristik sosial ekonomi masyarakat miskin, yang antara lain melihat tentang bagaimana keberadaan tingkat pendidikan masyarakat, usia, pendapatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan dikatakan absolut apabila kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja (Suryawati, 2005, hlm. 122). Kemiskinan yang diteliti penulis di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut ini termasuk ke dalam kemiskinan absolut, karena penelitian ini difokuskan kepada keluarga miskin yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan masyarakat tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai dasar pengukuran kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (sandang,

perumahan, pendidikan dan kesehatan). Oleh karena itu, penulis melakukan pra penelitian di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut untuk mendeskripsikan kemiskinan dengan menggunakan pengukuran dari Badan Pusat Statistik. Berikut data yang penulis dapat dari pra penelitian tersebut :



Gambar 1.2
Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

Sumber data : Pra Penelitian (data diolah)

Dari 10 responden sebagian besar keluarga miskin belum terpenuhi kebutuhannya untuk pendidikan yaitu rata-rata dari mereka hanya lulusan Sekolah Dasar ataupun tidak tamat Sekolah Dasar. Jika dilihat dari kebutuhan dasar pangan manusia idealnya tiga kali sehari. Akan tetapi masih ada keluarga yang hanya memenuhi kebutuhan pangan dua kali yaitu sebanyak tiga orang. Untuk kebutuhan sandang dilihat dari sangat terpenuhi (bersih dan rapih), kurang terpenuhi (bersih dan tidak rapih) dan tidak terpenuhi (tidak bersih dan tidak rapih). Kebutuhan sandang keluarga miskin dari 10 responden ada 6 orang yang terpenuhi sedangkan dua diantara mereka kurang terpenuhi dan dua orang lagi tidak terpenuhi.

Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu papan papan dikatakan sangat terpenuhi apabila kondisi rumahnya permanen yaitu dinding rumahnya tembok, lantai berubin dan atapnya genteng. Kurang terpenuhi yaitu apabila kondisinya semi permanen jika dinding setengah tembok/kayu, lantai plester dan atap seng sedangkan untuk kebutuhan rumah yang tidak terpenuhi yaitu non permanen jika dinding rumahnya kayu/bilik, lantai plester dan atap seng. Keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong 7

orang diantara mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar papannya sedangkan dua diantara mereka tidak memenuhi kebutuhan dasar papan dan satu diantara mereka sangat memenuhi kebutuhan dasar papannya.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Dimana tingginya pendidikan seseorang akan dapat menopang hidupnya untuk lebih layak yaitu lebih tingginya pendapatan yang diperoleh, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pendapatan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia (Suryawati, 2005, hlm. 122). Seseorang dikatakan kebutuhan pendidikannya terpenuhi jika sudah mengikuti wajib belajar sembilan tahun atau setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari hasil pra penelitian, semua keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong kebutuhan pendidikan mereka tidak terpenuhi. Sebab, 7 orang di antara mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan 3 diantara mereka tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Padahal mayoritas dari mereka termasuk pada usia produktif.

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan (Cahyono, 1998, hlm. 202). Usia produktif berkisar antara 15 - 64 tahun yaitu merupakan usia ideal bagi para pekerja. Dimasa produktif, secara umum semakin bertambahnya usia maka pendapatan akan semakin meningkat dan tergantung juga pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Kekuatan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas sangat erat kaitannya dengan usia, karena bila usia seseorang telah melewati masa produktif maka akan semakin menurun kekuatan fisiknya sehingga produktivitasnya pun menurun dan pendapatan juga ikut menurun (Setiawina, 2013, hlm. 177).

Selain kebutuhan faktor ekonomi, selanjutnya yaitu kepemilikan modal. Dalam hal ini, kepemilikan modal untuk kegiatan usaha, produksi, pengembangan

dan keberlangsungannya yang dapat menghasilkan uang atau pendapatan yang dimiliki dan digunakan oleh individu untuk bekerja. Gambaran kepemilikan modal berkaitan dengan mata pencaharian atau pekerjaan kepala keluarga miskin. Berikut data pekerjaan keluarga miskin Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut:

Tabel 1.4
Pekerjaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
Pedagang	2	20
Serabutan	2	20
Lain-lain	6	60
Total	10	100

Sumber Data : Pra Penelitian (data diolah)

Dari 10 responden 6 diantaranya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), sedangkan dua diantara mereka bekerja serabutan dengan kata lain mereka hanya bekerja jika ada yang menyuruhnya bekerja atau sifatnya tidak menentu dan dua diantara mereka memiliki pekerjaan sebagai pedagang.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang kemiskinan di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut khususnya kemiskinan dalam ekonomi. Selain itu, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendidikan, usia, gender dan status marital. Selengkapnya judul penelitian yang penulis angkat adalah **“ANALISIS KEMISKINAN DI KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pendapatan keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong jika dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital ?

2. Bagaimana gambaran kepemilikan modal keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong jika dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital ?
3. Bagaimana gambaran kebutuhan dasar keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong jika dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital?
4. Bagaimana gambaran beban tanggungan keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pendapatan keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong jika dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital ?
2. Untuk mengetahui gambaran kepemilikan modal keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong jika dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital ?
3. Untuk mengetahui gambaran kebutuhan dasar keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong jika dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital?
4. Untuk mengetahui gambaran beban tanggungan keluarga miskin di Kecamatan Bayongbong dilihat dari pendidikan, usia, gender dan status marital?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah ilmu ekonomi makro, khususnya terkait kemiskinan masyarakat Indonesia.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai kemiskinan masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan mengenai kemiskinan dan penanggulangannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai konsep permasalahan penelitian, diantaranya yaitu pengertian kemiskinan, teori kemiskinan, penyebab kemiskinan, pengukuran kemiskinan, jenis kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai objek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, instrumen penelitian serta teknik analisis data untuk meneliti karakteristik kemiskinan di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam laporan penelitian ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan rekomendasi yang coba di kemukakan oleh penulis sebagai alternatif pemecahan masalah berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.